

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP - SKPD Tahun 2023 kepada Pemerintah pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja perangkat daerah secara utuh sepanjang tahun 2023, berdasarkan tolak ukur kinerja yang disepakati dalam pernyataan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 kepada Kepala Daerah. Dengan demikian gambaran kinerja SKPD tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan diharapkan dapat menyajikan dengan baik secara transparan dan akuntabel guna terwujudnya Clean Government dan Good Governance, sesuai dengan Visi TEBO TUNTAS 2023.

Muara Tebo, 11 Januari 2024

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Tebo



SUGIYARTO, SP
NIP. 19681124 198912 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Struktur Organisasi	3
1.8. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Tujuan	8
2.1.2 Rencana Kerja	9
2.1.3 Rencana Kinerja Utama (IKU).....	9
2.1.4 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1 Analisa Capaian Organisasi	13
3.1.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	14
3.2 Realisasi Anggaran	15
3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	16
3.1.1 Analisis Keekonomisan, Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk merealisasikan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka dibuatkan laporan dalam bentuk Laporan kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk memper tanggungjawabkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo;

2. Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo;
4. Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahun; dan
5. Sebagai informasi untuk alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Tebo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2023; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerjanya.

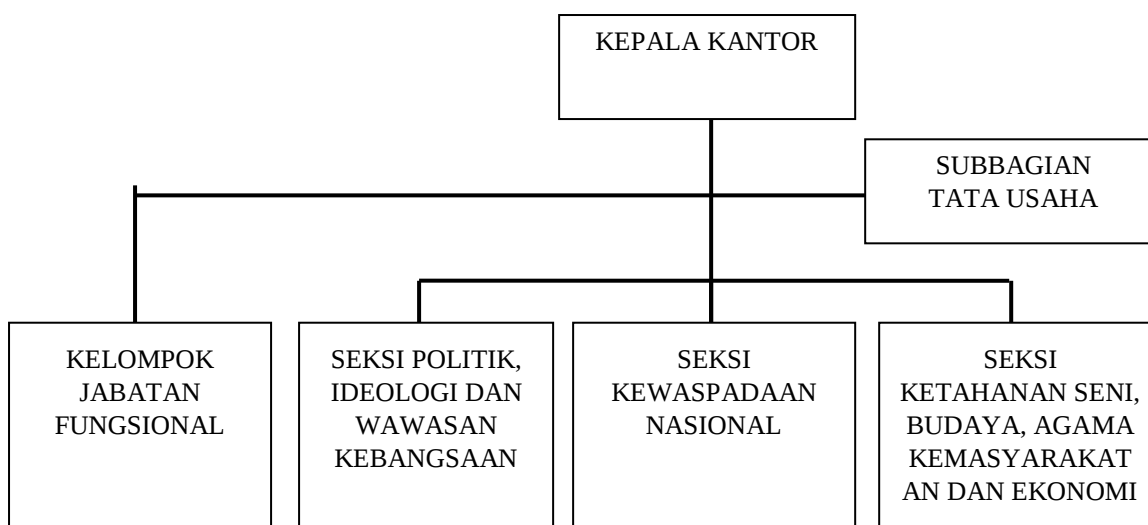
1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo terdiri dari Kepala Kantor yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Seksi, Unit Pelaksana teknis Kantor dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Seksi Kewaspadaan Nasional
5. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sedangkan untuk jumlah personil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur

No.	Golongan (PNS/Kontrak)	Jumlah
1	IV	1
2	III	13
3	II	2
4	Tenaga Kontrak	12
	Jumlah	28

Tabel 1.2 Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan (PNS/Kontrak)	Jumlah
1	S 2	0
2	S 1	17
3	D III	3

4	SLTA	8
5	SLTP	0
6	SD	0
	Jumlah	28

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan LKjIP, landasan hukum, maksud dan tujuan, Struktur Organisasi dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan gambaran umum uraian Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Tebo tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Tebo tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo diarahkan pada pembangunan agribisnis untuk menyokong perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 adalah “**Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)**”. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yang ada pada dokumen Renstra mengacu pada dokumen Renstra 2023-2026 mengacu pada **Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram** yang mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat” dan sasaran “Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo mempunyai tugas Mewujudkan Kabupaten Tebo yang Aman, Tertib, dan Tentram. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai dalam tahun 2023. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan mewujudkan Mewujudkan Kabupaten Tebo yang Aman, Tertib.

Sasaran yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	75 %
			Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	75 %
			Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	75 %
			Persentase kepatuhan ormas	75 %
		Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Tingkat partisipasi politik masyarakat	65 %

2.1.2 Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai oleh organisasi. Rencana kerja Tahunan digunakan untuk menyusun skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan karena adanya batasan alokasi anggaran untuk SKPD. Dengan adanya rencana kerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau lebih dikenal dengan IKU adalah merupakan alat ukur keberhasilan dari sebuah instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core bussiness) yang diemban. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada

RPJD Perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2005-2025. Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yang menjadi acuan untuk periode tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan
1.	Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang terselesaikan}}{\text{Kasus yang terselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang terselesaikan}}{\text{Konflik yang terselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Terlaksana}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100\%$
		Persentase kepatuhan ormas	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Patuh}}{\text{Total Ormas}} \times 100\%$
2.	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Tingkat partisipasi politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pemilih}}{\text{Total pemilih}} \times 100\%$

2.1.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tebo kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program kegiatan tahunan Tahun 2023 yang disertakan Indikator Kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Daerah	1,924,558,967
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	959,445,800
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,151,066,832
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,936,000
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	133,878,600
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	544,330,000
	JUMLAH	4.750.216.199

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui gambaran mengenai persentase capaian kinerja tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel skala dan kategori capaian kinerja berikut ini:

Tabel 3.1
Skala dan Kategori Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100 %	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 75 %	Cukup Baik
4	> 55%	Kurang

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LkjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar guna menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (benefit) dan dampak (Impact). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan Formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan IKU

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Sumber Data
1	Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	$\frac{\text{Jumlah Kasus}}{\text{Kasus yang terselesaikan}} \times 100\%$	75%	Tempat peribadatan di Kab Tebo
		Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik}}{\text{Konflik yang terselesaikan}} \times 100\%$	75%	Data konflik yang terjadi langsung di daerah-daerah Kab Tebo
		Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Terlaksana}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100\%$	75%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Tebo
		Persentase kepatuhan ormas	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Patuh}}{\text{Total Ormas}} \times 100\%$	75%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Tebo
2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Tingkat partisipasi politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pemilih}}{\text{Total pemilih}} \times 100\%$	65%	Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung target setiap Indikator Kinerja dan Realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja, yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	75%	0	0
		Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	75%	100%	133%
		Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	75%	100%	133%
		Persentase kepatuhan ormas	75%	100%	133%
2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Tingkat partisipasi politik masyarakat	65%	0	0

- Tidak ada permasalahan ataupun konflik tentang Indikator Kinerja Terciptanya kerukunan umat beragama pada Kabupaten Tebo tahun 2023.
- Terdapat 23 konflik yang terjadi di Kabupaten Tebo yang meliputi konflik perkebunan, konflik angkutan batu bara, konflik antar perusahaan dan masyarakat yang sudah dapat di atasi dan mendapatkan hasil yang positif bagi pihak yang berkonflik.
- Terdapat 45 Ormas yang ada di Kabupaten Tebo sampai pada tanggal 31 Desember 2023 dan semuanya masih aktif.
- Tidak ada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daeah pada tahun 2023 diadakan Dua kali Penyuluhan tentang pemilih pemula pada Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA) dan Dua kali Forum Diskusi Politik pada Organisasi Perempuan, untuk proses pemilu menghadapi tahun 2024 berjalan dengan baik sampai pada akhir tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas maka tingkat capaian target sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebesar **133%** dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

3.2 Realisasi Anggaran

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo pada Tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran Rp. 20,862,043,136,-. Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 20,171,910,050,- (96,69 %) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah/Kota	2.449.450.769	1.993.370.002	81,38	456.080.767
2	Prorgam Penguatan Ideologi Pancasila dan	1.110.925.800	1.092.910.792	98,38	18.015.008

	Karakter Bangsa				
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.186.326.967	16.171.976.432	99,91	14.350.535
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	56.936.000	54.618.000	95,93	2.318.000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	224.073.600	204.741.730	91,37	19.331.870
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	834.330.000	654.293.094	78,42	180.036.906
	Jumlah	20.862.043.136	20.171.910.050	96,69	690.133.086

3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.3.1 Analisis Keekonomisan, Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Anggaran

Pengukuran keekonomisan dan efisiensi Penggunaan Sumber Data menggunakan rasio ekonomi dan rasio efisiensi dengan perhitungan seperti dijelaskan dibawah ini:

a. Rasio Kinerja Ekonomi

Rasio kinerja ekonomi dihitung dengan cara membandingkan antara rasio ekonomi realisasi dan rasio ekonomi rencana, sehingga semakin kecil rasio ekonomi, makin ekonomis suatu aktivitas karena biaya per unit output menurut rencana pada tingkat

kualitas output tertentu dengan pengukuran skala rasio ekonomi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Rasio Kinerja Ekonomi

Rasio Ekonomi (%)	Makna Ekonomi	Skor Ekonomi
< 90	Sangat Ekonomis	5
90 - 94,99	Ekonomis	4
95 - 100	Cukup Ekonomis	3
100,01 - 105	Kurang Ekonomis	2
>105	Tidak Ekonomis	1

Untuk melihat pengukuran dengan rasio ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Hasil Pengukuran Rasio Ekonomi Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian %	Skor Ekonomi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.449.450.769	1.993.370.002	81,38	Sangat Ekonomis
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.907.266.301	1.455.032.232	76,29	Sangat Ekonomis
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.819.708.301	1.367.874.232	75,17	Sangat Ekonomis
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.598.000	77.598.000	100,00	Cukup Ekonomis
3	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.960.000	9.560.000	95,98	Cukup Ekonomis
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.680.700	247.262.850	99,71	Cukup Ekonomis
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.872.000	98,72	Cukup Ekonomis
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	Cukup Ekonomis
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.998.300	21.993.800	99,98	Cukup Ekonomis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.982.400	21.982.400	100,00	Cukup Ekonomis
6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100,00	Cukup Ekonomis
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	100,00	Cukup Ekonomis

8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.700.000	174.414.650	99,27	Cukup Ekonomis
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.731.600	4.731.600	100,00	Cukup Ekonomis
1	Pengadaan Mebel	4.731.600	4.731.600	100,00	Cukup Ekonomis
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	202.065.168	201.171.820	99,04	Cukup Ekonomis
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.390.000	1.390.000	100,00	Cukup Ekonomis
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.995.000	30.101.652	97,12	Cukup Ekonomis
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.680.168	169.680.168	100,00	Cukup Ekonomis
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.707.000	85.171.500	98,23	Cukup Ekonomis
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.932.000	66.556.500	97,98	Cukup Ekonomis
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	7.005.000	7.005.000	100,00	Cukup Ekonomis
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	11.770.000	11.610.000	98,64	Cukup Ekonomis
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.110.925.800	1.092.910.792	98,38	Cukup Ekonomis
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.110.925.800	1.092.910.792	98,38	Cukup Ekonomis
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	25.339.000	24.131.000	95,23	Cukup Ekonomis
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	20.000.000	19.914.000	99,57	Cukup Ekonomis
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	1.027.000.000	1.014.210.992	98,75	Cukup Ekonomis
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	38.586.800	34.654.800	89,81	Sangat Ekonomis

	Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.				
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.186.326.967	16.171.976.432	99,91	Cukup Ekonomis
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	16.186.326.967	16.171.976.432	99,91	Cukup Ekonomis
1	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	77.360.135	65.423.600	84,57	Sangat Ekonomis
2	Penyusunan bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.039.143.132	16.038.887.132	100,00	Cukup Ekonomis
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.020.000	38.320.000	98,21	Cukup Ekonomis
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.803.700	29.345.700	95,27	Cukup Ekonomis

IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	56.936.000	54.618.000	95,93	Cukup Ekonomis
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	56.936.000	54.618.000	95,93	Cukup Ekonomis
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	56.936.000	54.618.000	95,93	Cukup Ekonomis
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	224.073.600	204.741.730	91,37	Ekonomis
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	224.073.600	204.741.730	91,37	Ekonomis
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	20.000.000	10.310.800	51,55	Sangat Ekonomis
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	73.761.800	66.151.380	89,68	Sangat Ekonomis
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	30.311.800	29.783.800	98,26	Cukup Ekonomis
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	100.000.000	98.495.750	98,50	Cukup Ekonomis
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	834.330.000	654.293.094	78,42	Sangat Ekonomis
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	834.330.000	654.293.094	78,42	Sangat Ekonomis

	Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial n Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial				
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	46.600.000	44.016.000	94,45	Ekonomis
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	86.125.000	76.425.000	88,74	Sangat Ekonomis
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	44.105.000	41.895.000	94,99	Ekonomis
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	657.500.000	491.957.094	74,82	Sangat Ekonomis
	TOTAL BELANJA	20.862.043.136	20.171.910.050	96,69	Cukup Ekonomis

Tabel diatas menunjukan dari pengukuran rasio ekonomi terhadap 10(Sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Terdapat 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan yang mempunyai nilai kinerja cukup ekonomis.
- Terdapat 2 (Dua) sub kegiatan yang mempunyai nilai kinerja ekonomis.
- Terdapat 7 (Tujuh) sub kegiatan yang mempunyai nilai kinerja sangat ekonomis.

b. Rasio Kinerja Efisiensi

Rasio Kinerja Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisiensi suatu aktivitas karena realisasi biaya perunit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu dengan skala pengukuran rasio efisiensi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Skala Pengukuran Efisiensi

Kinerja Efektifitas	Makna Kinerja	Skor Efisiensi
80 - 100	Sangat Efisien	5
70 - 79	Efisien	4
60 - 69	Cukup Efisien	3
50 - 59	Kurang Efisien	2
< 50	Tidak Efisien	1

Yang mana hasil rincian pengukuran dengan menggunakan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Ratio Efisiensi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian %	Skor Efektivitas
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.449.450.769	1.993.370.002	81,38	Sangat Efisien
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.907.266.301	1.455.032.232	76,29	Sangat Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.819.708.301	1.367.874.232	75,17	Sangat Efisien
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.598.000	77.598.000	100,00	Sangat Efisien
3	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.960.000	9.560.000	95,98	Sangat Efisien
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.680.700	247.262.850	99,71	Sangat Efisien
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.872.000	98,72	Sangat Efisien
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Efisien
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.998.300	21.993.800	99,98	Sangat Efisien
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.982.400	21.982.400	100,00	Sangat Efisien
6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Efisien
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Efisien
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.700.000	174.414.650	99,27	Sangat Efisien
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.731.600	4.731.600	100,00	Sangat Efisien
1	Pengadaan Mebel	4.731.600	4.731.600	100,00	Sangat Efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	202.065.168	201.171.820	99,04	Sangat Efisien
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.390.000	1.390.000	100,00	Sangat Efisien
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.995.000	30.101.652	97,12	Sangat Efisien
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.680.168	169.680.168	100,00	Sangat Efisien
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.707.000	85.171.500	98,23	Sangat Efisien
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.932.000	66.556.500	97,98	Sangat Efisien
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	7.005.000	7.005.000	100,00	Sangat Efisien
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	11.770.000	11.610.000	98,64	Sangat Efisien

	Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya				
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.110.925.800	1.092.910.792	98,38	Sangat Efisien
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.110.925.800	1.092.910.792	98,38	Sangat Efisien
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	25.339.000	24.131.000	95,23	Sangat Efisien
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	20.000.000	19.914.000	99,57	Sangat Efisien
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	1.027.000.000	1.014.210.992	98,75	Sangat Efisien
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	38.586.800	34.654.800	89,81	Sangat Efisien
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.186.326.967	16.171.976.432	99,91	Sangat Efisien
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	16.186.326.967	16.171.976.432	99,91	Sangat Efisien
1	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di	77.360.135	65.423.600	84,57	Sangat Efisien

	Daerah				
2	Penyusunan bahan Perumusan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.039.143.132	16.038.887.132	100,00	Sangat Efisien
3	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.020.000	38.320.000	98,21	Sangat Efisien
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.803.700	29.345.700	95,27	Sangat Efisien
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	56.936.000	54.618.000	95,93	Sangat Efisien
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	56.936.000	54.618.000	95,93	Sangat Efisien
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	56.936.000	54.618.000	95,93	Sangat Efisien
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	224.073.600	204.741.730	91,37	Sangat Efisien
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	224.073.600	204.741.730	91,37	Sangat Efisien
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	20.000.000	10.310.800	51,55	Sangat Efisien

	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.				
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	73.761.800	66.151.380	89,68	Sangat Efisien
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	30.311.800	29.783.800	98,26	Sangat Efisien
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	100.000.000	98.495.750	98,50	Sangat Efisien
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	834.330.000	654.293.094	78,42	Sangat Efisien
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial n Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	834.330.000	654.293.094	78,42	Sangat Efisien
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	46.600.000	44.016.000	94,45	Sangat Efisien
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	86.125.000	76.425.000	88,74	Sangat Efisien
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	44.105.000	41.895.000	94,99	Sangat Efisien

	Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspdaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspdaan serta Penanganan Konflik di Daerah.				
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	657.500.000	491.957.094	74,82	Efisien
	TOTAL BELANJA	20.862.043.136	20.171.910.050	96,69	Sangat Efisien

Pengukuran rasio efisiensi dengan membandingkan realisasi terhadap target 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan hasil kinerjanya Sangat Efisien dan 1 (Satu) sub kegiatan yang hasil kinerjanya Efisien.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui berbagai kegiatan Diklat Teknis Fungsional, Kursus-kursus, Work Shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-rapat yang terjadwal atau secara insidental, maupun koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi berbagai permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan dalam rangka menghimpun sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan selanjutnya.
4. Meningkatkan sistem penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang lebih baik secara terpadu dan terukur dengan indikator - indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalam pencapaian dan evaluasi serta guna kebijakan di masa datang.

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023 masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran secara detail dari kegiatan yang dilaksanakan yang telah ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi. oleh karena itu masukan-masukan positif baik penyempurnaan dan pengembangan sistem akuntabilitas publik di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sangat diperlukan.

Muara Tebo, 11 Januari 2024

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Tebo

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "TEBO" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK". A black ink signature is written across the stamp, starting from the left and ending on the right.

SUGIYARTO, SP.

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19681124 198912 1 002